



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 445/MENKES/SK/XI/2013

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN IMS
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IX/2012, berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan, struktur, tugas, dan fungsi Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja terdiri dari Sub Pokja, Tim Teknis, Tim Panel Ahli dan dibantu oleh Sekretariat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan koordinasi, harmonisasi dan sosialisasi kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 2. mengintegrasikan dan mensinergikan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan IMS yang sudah dilakukan oleh program lain dalam pencapaian target.
- KEEMPAT : Sub Pokja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sesuai bidangnya masing-masing:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 2. melakukan kajian terhadap masalah atau isu-isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 3. memberikan masukan atau rekomendasi kepada Kelompok Kerja untuk pengembangan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 4. membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada sekretariat untuk dibahas pada saat rapat Kelompok Kerja.
- KELIMA : Tim Panel Ahli terdiri dari Sub Panel Ahli, yang mempunyai tugas:
1. memberikan masukan secara teknis kepada Kelompok Kerja atau Sub Pokja sesuai bidang keahliannya;
 2. melakukan kajian terhadap program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS sesuai bidangnya;
 3. menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk mengkaji dan membahas isu penting dalam program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 4. memfasilitasi masing-masing Sub Pokja dalam pengembangan bidang tugasnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Sekretariat Kelompok Kerja bertugas:
1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan *budgeting*, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja;
 2. mengkompilasi penyusunan rencana kerja dan laporan masing-masing Sub Pokja, Tim Teknis dan Tim Panel Ahli; dan
 3. memfasilitasi kegiatan terkait Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IX/2012 tentang Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2013

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA



NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 445/MENKES/SK/XI/2013
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN
IMS KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN KESEHATAN

- Ketua : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sekretaris : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Kepala Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan
 7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- I. Sub Pokja:
- A. Sub Pokja Pemberdayaan, Pencegahan dan Dukungan Berbasis Masyarakat, Termasuk Kelompok Dukungan Sebaya
- Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Pusat Komunikasi Publik
 2. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
 3. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
 4. Direktur Bina Ketahanan Remaja, BKKBN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. Sub Pokja Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)

Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular
Langsung

Koordinator Sub Pokja Seksual :

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Koordinator Sub Pokja Non Seksual :

Direktur Bina Kesehatan Jiwa

Koordinator Sub Pokja PPIA :

Direktur Bina Kesehatan Ibu

- Anggota :
1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
 2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 4. Direktur Bina Gizi
 5. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
 6. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
 7. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
 8. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 9. Direktur Bina Kesehatan Anak
 10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
 11. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT, BPOM
 12. Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM
 13. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN
 14. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Ciloto

C. Sub Pokja Pengembangan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

- Anggota
1. Seditjen BUK
 2. Seditjen Bina Gizi dan KIA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Direktur SIMKAR KESMA, Ditjen PP dan PL
4. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes
5. Kepala Pusat Tehnologi Terapan dan Epidemiologi Klinik, Balitbangkes
6. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes

D. Sub Pokja Regulasi dan Advokasi

- Ketua : SAM Bidang Medikolegal
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Biro Hukum dan Humas, BPOM
 3. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Aparatur

II. Tim Teknis

A. Tim Teknis Sub Pokja Pemberdayaan, Pencegahan dan Dukungan Berbasis Masyarakat, Termasuk Kelompok Dukungan Sebaya

1. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan
2. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Kerja
4. Kasubdit Bina Kemitraan Kesehatan Kerja
5. Kasubdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
6. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK
7. Kasubdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
8. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
9. Kabid Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
10. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga
11. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Dasar
12. Kasubdit Pencegahan IMS dan AIDS, BKKBN

Sekretaris 1 : Margaretha Meitha F. Antou, SKM

Sekretaris 2 : dr. Nies Andekayani Enaldy, MS, Sp.Ok



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. Tim Teknis Sub Pokja Layanan Komprehensif Berkesinambungan

1. Kasubdit AIDS dan PMS
2. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan
3. Kasubdit Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
4. Kasubdit Mikrobiologi dan Imunologi
5. Kasubdit Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
6. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan di RSU
7. Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan

Sekretaris 1 : Nurjannah, SKM, M,Kes

Sekretaris 2 : dr. Indri Oktaria Sukmaputri

C. Tim Teknis Sub Pokja Penularan Melalui Seksual

1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi
3. Kepala Bidang Biomedis, Balitbangkes
4. Kasubdit Kesehatan Matra
5. Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker
6. Kasubdit Standarisasi Pelayanan Kefarmasian
7. Kasubdit Farmasi Klinik

Sekretaris 1 : dr. Helen Dewi Prameswari, MARS

Sekretaris 2 : dr. Hariadi Wisnu Wardhana

D. Tim Teknis Sub Pokja Penularan Non Seksual

1. Kasubdit Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok Alkohol, Dit. Bina Kesehatan Jiwa
2. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Kasubdit Bina Perlindungan Anak Khusus
5. Kasubdit Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi
6. Kasubdit Bina Keswa Kelompok Berisiko
7. Kasubdit Diare
8. Kasubdit Diabetes Mellitus
9. Kasubdit Tuberkulosis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10. Kasubdit Bina Keperawatan RS Khusus
 11. Kasubdit Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lainnya
 12. Kasubdit Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional
 13. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional
- Sekretaris 1 : dr. Afriana Nurhalina, M.EPID
Sekretaris 2 : Rizky Hasby, SKM

E. Tim Teknis Sub Pokja Pencegahan Penularan Ibu Anak/PPIA

1. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Dit.Bina Kes Ibu
2. Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi
3. Kasubdit Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko, Direktorat Bina Kesehatan Anak
4. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Bina Kesehatan Ibu
5. Kasubdit Bina Keluarga Berencana
6. Kasubdit Bina Gizi Klinik
7. Kasubdit Bina Pelayanan Kebidanan

Sekretaris 1 : dr. Bayu Yuniarti, M.Kes

Sekretaris 2 : dr. Bangkit Purwandari

F. Tim Teknis Sub Pokja Pengembangan Surveilans dan Riset, Monitoring dan Evaluasi

1. Kasubdit Surveilans dan Respon KLB, Ditjen PP dan PL
2. Kepala Bidang Biomedis, Balitbangkes
3. Kasubdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Ditjen PP dan PL
4. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes
5. Kepala Bidang Epidemiologi Klinik, Balitbangkes
6. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
7. Kepala Bidang Analisis dan Desiminisasi Informasi
8. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik
9. Kepala Bidang Upaya Kesehatan, Balitbangkes

Sekretaris 1: Victoria Indrawati, SKM, MSc

Sekretaris 2 : Vinny Sutriani Tobing, S.Psi, MPH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

G. Tim Teknis Sub Pokja Advokasi dan Regulasi

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen PP dan PL
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen BUK
4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Bina Gizi dan KIA
5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Badan PPSDM Kesehatan
7. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
8. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi

Sekretaris 1: dr. Trijoko Yudopuspito, MScPH

Sekretaris 2 : dr. Ainor Rasyid

III. Tim Panel Ahli

- Ketua : Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD (KAI)
Wakil Ketua 1 : Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, SpPD (KHOM)
Wakil Ketua 2 : Prof. dr. Saiful F. Daili, SpKK (K)
Sekretaris 1 : Dr. Mondastri Korib Sudaryo, MS. DSc
Sekretaris 2 : dr. Erwin Astha Triyono, SpPD, KPTI, FINASIM
Anggota :

A. Sub Panel Ahli Pencegahan Penularan HIV dan IMS

1. Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD, M.Kes, FINASIM
2. Prof. Dr. dr. M. Alimin Maidin, MPH
3. Dr. dr. Toha Muhaimin, MSc
4. Dr. dr. Umar Zein, DTM&H, SpPD, KPTI, FINASIM
5. dr. Santoso Edy Budiono, SpKK, FINS DV, FAADV
6. dr. Fonny J. Silfanus, M.Kes
7. drg. Burhanuddin Agung, MM
8. Drs. Octavery Kamil, Msi
9. dr. Asep Purnama, SpPD
10. Dr. dr. Santi Martini, M.Kes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- B. Sub Panel Ahli Pengembangan Profesi dan Pemberdayaan Komunitas
1. Prof. Irwanto, PhD
 2. Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, MPH
 3. drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes, MH
 4. Drs. Dachroni, MPH
 5. Ismoyowati, SKM, M.Kes
 6. Husein Habsyi, SKM, MOH
 7. Dedy Dharmawan, SKM
 8. Adiatma Y.M. Siregar
- C. Sub Panel Ahli Pengembangan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi
1. Pof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, MPH
 2. Prof. dr. Budi Utomo
 3. Prof. dr. Sori Sarumpaet, MPH
 4. dr. I.Nyoman Kandun, MPH
 5. dr. Fera Ibrahim, MSc, PhD, SpMK(K)
 6. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc
 7. Dr. Kemal N. Siregar
- D. Sub Panel Ahli Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual
1. Dr. dr. Wresti Indriatmi, SpKK(K), M.Epid
 2. dr. Farida Zubier, SpKK(K)
 3. Dr. dr. Hans Lumitang, SpKK (K)
 4. dr. Anak Agung Gde Putra Wiraguna, SpKK(K)
 5. dr. Rasmia Rowawi, SpKK(K)
 6. dr. Richard Hutapea, SpKK(K)
 7. dr. Nurdjanah Niode, SpKK
 8. dr. Lucky Waworuntu, SpKK
- E. Sub Panel Ahli Pengembangan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan
1. Prof. Dr. dr. Tuti Parwati Merati, SpPD, KPTI
 2. Dr. dr. Evy Yuniastuti, SpPD, K-AI, FINASIM
 3. dr. Yandri Wijayanti, SpPD, Ph.D
 4. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, SpPD-KPTI
 5. dr. Janto Gunawan Lingga, SpP
 6. dr. Iman Firmansyah, SpPD,FINASIM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

7. dr. S.H. Manullang, SpB
 8. dr. H. Armen Ahmad, SpPD, K-PTI
 9. dr. Ahmad Rizal, SpS, PhD
 10. dr. Yovita Hartantri, SpPD
 11. Dr. dr. Rino A.Gani, SpPD, KGEH
 12. dr. Nia Kurniati, SpA(K)
 13. dr. Priyanti Z. Soepandi, SpP(K),MARS
 14. Dr. dr. Erlina Burhan, MSc, SpP(K)
 15. dr. Heidy Agustin, Sp.P
 16. dr. Satiti Retno Pujiati, SpKK(K)
 17. dr. Paul Frans Matulesy, MND, SpGK, PGK
 18. Prof. Dr. dr. Nur Puji Astuti Taslim, SpGK,MPHM
 19. dr. Tjahjani Natriana, SpS
 20. Dr. dr. Kurnia Fitri Djamil, SpPD, K-PTI
 21. dr. Anna Uyainah ZN, SpPD, K-P, MARS
 22. Josephine R Marieta, NpsiT, Psikolog
 23. Ace Sudrajat, SKp, M.Kes
- F. Sub Panel Ahli Penguatan Konseling dan Pemeriksaan HIV
1. dr. Sigit Priohutomo, MPH
 2. dr. Ratna Mardiati, SpKJ
 3. dr. Eka Viora, SpKJ
 4. dr. E.Y. Wenny Astuti Achwan, M.Kes
 5. dr. Nirmala Kesumah, MHA
 6. dr. Dyah Agustina Waluyo
 7. Dra. Retno Suhapti, SU, MA, Psikolog
 8. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi, MOP, Psikolog
- G. Sub Panel Ahli Pengembangan PPIA
1. Dr. dr. Ali Sungkar, SpOG (K)
 2. dr. Yudianto Budi Saroyo, SpOG(K)
 3. dr. Dina Muktiarti, Sp.A(K)
 4. dr. Anggraini Alam, Sp.A(K)
 5. dr. Ekarini Aryasatiani, SpOG (K)
 6. dr.Dini Pusianawati,SpOG (K)
 7. dr. Dyah Rumekti Hadiati, SpOG(K)
 8. dr. Dyani Kusumowardhani, SpA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

9. Nelly Yardes, SKP, M.Kes
 10. Masyitha, SST, SKM, M.Kes
 11. Zulvi Wiyanti, SST, M.Kes
- H. Sub Panel Ahli Pemantapan Mutu Diagnostik dan Penunjang
1. dr. July Kumalawati, DMM, SpPK(K)
 2. dr. Dalima Astrawinata, SpPK
 3. dr. Agus S. Kosasih, SpPK, MARS
 4. Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK(K)
 5. dr. Agnes Rengga Indarti, SpPK, M.Kes
 6. dr. Sondang Maryarutka, SpPK
 7. dr. Umi S Intansari, SpPK
 8. dr. Endang Retnowati, MS, SpPK
 9. Dr. Yuyun Soedarmono
 10. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, SPMK(K)
 11. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, SpPK
 12. dr. Anggi Gayatri, SpPK
- I. Sub Panel Ahli Pengembangan Kefarmasian
1. Prof. dr. Iwan Dwi Prahasto, M.Med, Sc.Ph
 2. dr. Husniah R. TH. Akib, MS, M.Kes, SpAK(K), SpKF
 3. dr. Masfar Salim, SpF
 4. dr. Nafrialdi, SpPD, SpFar(K), PhD
 5. Dra. Ega Rogayah, Apt
 6. A.C Aditya Natalia G.A, S.Si, Apt, Sp.FRS
 7. Dra. Yulia Trisna, Apt
- J. Sub Panel Ahli Penelitian
1. Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih, MS, SpParK
 2. dr. Rudi Wisaksana, SpPD-KPTI, PhD
 3. dr. Bacht Alisjahbana, Sp.PD, PhD
 4. dr. Syahrizal Syarief, MPH, PhD
 5. dr. Adhi Wibowo Nurhidayat, Sp.KJ, MPH
 6. Sudirman Nasir, SKed, MWH, PhD
 7. Dr. dr. Windhu Purnomo, MS
 8. dr. Hanny Nilasari, Sp.KK
 9. Dr. dr. Bagus Wijanarko, MPH
 10. dr. Darma Imran, Sp.S(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

11. dr. Erni Juwita Nelwan, SpPD, FINASIM
12. dr. Jarir At Thobari, Dpharm, PhD
13. dr. B. Sandjaya, DMM, DTM & H, MSPH
14. Drs. Jemadi, M.Kes
15. dr. Adria Rusli, SpP

IV. Sekretariat

- Ketua : Sekretaris Ditjen PP dan PL
- Wakil Ketua : Kasubdit AIDS dan PMS
- Sekretaris 1 : Kepala Seksi Standarisasi, Subdit AIDS dan PMS
- Sekretaris 2 : Kepala Seksi Bimbingan dan Kemitraan, Subdit AIDS dan PMS
- Anggota : 1. dr. Yulia Zubir, M.Epid
2. Sugeng Wiyana, SKM, MPH
3. Darini Lestari, AmKep
4. Maryani
5. Priajie Citolaksono, S.Sos

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI